

Politik Identitas dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial

Timur Tumanggor¹, Anang Anas Azhar^{2*}

^{1,2*} Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: timurtumanggor@gmail.com¹, ananganasazhar@uinsu.ac.id^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 17 Maret 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 30 April 2025; *Diterima* 20 Mei 2025; *Diterbitkan* 30 Mei 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi dan mobilisasi politik identitas dalam ruang demokrasi Indonesia serta implikasinya terhadap kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa politik identitas di Indonesia dimanfaatkan secara sadar oleh berbagai aktor politik melalui simbol, narasi agama dan budaya, serta media sosial. Politik identitas terbukti membentuk loyalitas politik berbasis afeksi, namun berdampak pada eksklusivitas, polarisasi, dan delegitimasi institusi demokrasi. Fenomena seperti Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 menjadi contoh konkret bagaimana identitas digunakan sebagai strategi elektoral yang efektif, namun berisiko memperdalam ketegangan sosial. Meskipun demikian, politik identitas juga memiliki potensi konstruktif apabila dikelola dalam kerangka budaya lokal yang inklusif serta ditopang oleh prinsip komunikasi Islam seperti *tasamuh* (toleransi), *syura* (musyawarah), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Nilai-nilai ini mampu membentuk ruang dialog yang harmonis dan mendorong partisipasi politik yang adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan multikultural, kebijakan publik yang mendukung integrasi sosial, dan pengarusutamaan etika komunikasi lintas identitas sebagai fondasi demokrasi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjunjung tinggi *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kata Kunci: Politik Identitas; Demokrasi Indonesia; Kohesi Sosial.

Abstract

This study examines the construction and mobilization of identity politics in Indonesia's democratic space and its implications for social cohesion and the quality of democracy. Using a qualitative approach with a case study method, this study found that identity politics in Indonesia is consciously utilized by various political actors through symbols, religious and cultural narratives, and social media. Identity politics has been proven to form affectation-based political loyalty, but it has an impact on the exclusion, polarization, and delegitimization of democratic institutions. Phenomena such as the 2017 Jakarta Regional Elections and the 2019 General Election are concrete examples of how identity is used as an effective electoral strategy, but risks deepening social tensions. Nevertheless, identity politics also has constructive potential if it is managed within the framework of inclusive local culture and supported by Islamic communication principles such as *tasamuh* (tolerance), *shura* (deliberation), and *ukhuwah* (brotherhood). These values are able to form a harmonious space for dialogue and encourage fair political participation. This study recommends the need to strengthen multicultural education, public policies that support social integration, and the mainstreaming of cross-identity communication ethics as the foundation of a sustainable, inclusive, and upholding democracy that upholds *Bhinneka Tunggal Ika*.

Keyword: Identity Politics; Indonesian Democracy; Social Cohesion.

1. Pendahuluan

Politik identitas muncul sebagai respons terhadap ketimpangan sosial-politik yang dialami kelompok tertentu dalam masyarakat. Ketika sistem politik lebih banyak mengakomodasi kepentingan elit, kelompok dengan identitas etnis, agama, atau budaya tertentu berupaya menyuarkan hak dan kepentingan mereka. Identitas kolektif menjadi instrumen penting untuk membangun solidaritas internal dan memperkuat posisi tawar dalam politik. Calhoun (1994) menjelaskan bahwa politik identitas merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi dan marginalisasi, di mana kelompok yang terpinggirkan berusaha menegaskan eksistensinya di ruang publik. Politik identitas dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam demokrasi, terutama oleh mereka yang merasa tidak terwakili dalam struktur politik. Dalam hal ini, politik identitas berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Castells (2010) menyatakan bahwa identitas kolektif memainkan peran signifikan dalam membentuk gerakan sosial modern, termasuk dalam mendorong perubahan politik. Meskipun seringkali dipandang negatif, politik identitas juga memiliki dimensi konstruktif sebagai saluran pemberdayaan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses demokratisasi. Fenomena politik identitas di Indonesia terlihat jelas dalam momen-momen politik penting, seperti pemilihan kepala daerah dan pemilu nasional. Salah satu contoh yang mencolok adalah Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana isu agama dan etnis digunakan untuk mempengaruhi persepsi dan pilihan pemilih. Dalam kontestasi tersebut, narasi keislaman sering kali diposisikan berhadapan dengan identitas kebangsaan, yang menimbulkan polarisasi di masyarakat. Syarif (2019) menunjukkan bahwa dikotomi antara “Islam” dan “Indonesia” digunakan secara strategis untuk menggagalkan dukungan politik. Meskipun strategi ini efektif dari segi elektoral, ia menimbulkan dampak negatif berupa ketegangan sosial dan fragmentasi antarwarga. Politik identitas juga terlihat dalam Pemilu Presiden 2019. Persaingan antar pasangan calon tidak hanya dipandang sebagai pertarungan visi dan misi, tetapi juga sebagai simbol representasi kelompok identitas tertentu. Polarisasi antara kubu yang diasosiasikan dengan nasionalisme dan kubu yang berafiliasi dengan Islam politik memperdalam perpecahan sosial. Garneau dan Schwadel (2022) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, politik identitas dapat menjadi alat demokrasi, namun juga berisiko merusak stabilitas sosial.

Konstruksi politik identitas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran aktif aktor-aktor politik, seperti partai politik, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Mereka menggunakan simbol-simbol identitas, seperti agama, budaya, dan etnis, untuk membangun kedekatan emosional dengan konstituen. Strategi ini sering kali digunakan untuk menggagalkan dukungan politik, terutama di wilayah dengan keragaman sosial yang tinggi. Mujani (2020) menyebutkan bahwa identitas dijadikan sebagai alat untuk menarik simpati pemilih dan membentuk loyalitas politik yang bersifat primordial. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengabaikan aspek rasional seperti program kerja atau visi kebijakan, sehingga pemilih lebih fokus pada aspek identitas daripada substansi politik itu sendiri. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan narasi identitas. Melalui platform digital, pesan-pesan politik yang berisikan muatan keagamaan, kedaerahan, atau kesukuan dapat dijangkau khalayak secara cepat dan luas. Penelitian Bennett *et al.* (2020) menunjukkan bahwa media digital dapat memperkuat komunitas berbasis identitas sekaligus meningkatkan pengaruh politiknya. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan risiko. Narasi yang disebarkan tidak selalu informatif atau inklusif dan sering kali mengandung disinformasi serta ujaran kebencian berbasis identitas, yang memperburuk perpecahan sosial di masyarakat. Politik identitas dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan representasi kelompok tertentu, namun juga membawa dampak negatif. Salah satu masalah utama adalah munculnya eksklusivitas sosial, yaitu kecenderungan untuk menyingkirkan kelompok dengan identitas berbeda. Ketika suatu identitas terlalu dominan dalam ruang politik, perbedaan tidak lagi dihargai, tetapi dianggap sebagai ancaman. Mujani (2020) menyebut fenomena ini sebagai "Intolerant Democrat Syndrome", di mana masyarakat yang aktif dalam politik cenderung intoleran terhadap keberagaman. Akibatnya, ruang publik menjadi tidak inklusif, dan hubungan antarkelompok semakin renggang.

Selain eksklusif, politik identitas juga dapat menyebabkan delegitimasi terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Ketika politik didefinisikan berdasarkan identitas sempit, kepercayaan masyarakat terhadap netralitas lembaga negara terganggu. Kebijakan dan keputusan politik seringkali dipandang lebih berpihak pada kelompok tertentu, bukan pada kepentingan umum. Margolis (2016) menjelaskan bahwa jika identitas menjadi dasar utama dalam menentukan arah politik, akuntabilitas dan logika kebijakan sering kali terabaikan. Dalam jangka panjang, ini dapat merusak kualitas demokrasi dan memicu konflik sosial lebih luas dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa politik identitas memiliki dampak signifikan dalam sistem demokrasi, baik dalam konteks positif maupun negatif. Deveaux (1999) mencatat bahwa meskipun politik identitas memberikan ruang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk mengartikulasikan suara mereka, hal ini juga dapat memperkuat stereotip dan menciptakan batas-batas sosial baru. Ketika identitas kelompok terlalu ditekankan, hubungan antarwarga bisa menjadi tegang, karena muncul kecenderungan untuk membatasi inklusi dan mendorong eksklusivitas. Tettey (2022) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, politik identitas dapat memperkuat solidaritas internal sekaligus memicu ketegangan horizontal antar kelompok yang berbeda. Selain itu, ruang digital menjadi arena baru dalam konstruksi politik identitas. Levitt (2022) menyoroti bagaimana komunitas daring dapat memperkuat kesadaran politik berbasis identitas kolektif. Forum-forum ini sering kali memperkuat narasi kelompok tertentu dan membentuk pandangan politik kolektif. Namun, hal ini juga menghadirkan risiko, yaitu pembentukan ruang diskursif yang tertutup, di mana dialog lintas identitas menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, politik identitas tidak hanya berkaitan dengan representasi, tetapi juga menyangkut perebutan pengaruh dalam ruang wacana demokratis. Berbagai kajian sebelumnya lebih banyak memandang politik identitas di Indonesia sebagai sumber konflik dan polarisasi. Penelitian Mujani (2020) mengidentifikasi "*Intolerant Democrat Syndrome*" sebagai dampak dari dominannya identitas kelompok dalam demokrasi. Margolis (2016) menekankan bahwa politik identitas berisiko mengurangi rasionalitas kebijakan dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Namun, kajian-kajian tersebut belum sepenuhnya menggali potensi positif politik identitas, khususnya dalam konteks budaya lokal yang beragam di Indonesia. Padahal, keberagaman identitas dapat menjadi dasar untuk mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif, jika dikelola dengan bijak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana politik identitas dikonstruksi dan dimobilisasi dalam ruang demokrasi Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor politik, tokoh masyarakat, dan pengamat, serta melalui analisis dokumen seperti berita media, pidato politik, dan unggahan media sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola-pola narasi identitas yang muncul. Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menggambarkan konteks sosial-politik yang kompleks dan dinamis (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Konstruksi dan Mobilisasi Politik Identitas dalam Demokrasi Elektoral Indonesia

Fenomena politik identitas di Indonesia semakin menonjol dalam peristiwa-peristiwa politik besar, terutama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu Presiden 2019. Dalam Pilkada Jakarta, isu agama digunakan secara eksplisit sebagai strategi kampanye. Narasi keislaman digunakan untuk

menggambarkan lawan politik sebagai individu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama mayoritas. Lestari (2019) mengungkapkan bahwa pendekatan ini menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, serta mengalihkan fokus pemilu dari program kerja menjadi pertarungan identitas. Wingarta *et al.* (2022) menambahkan bahwa identitas agama dan etnis memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, sehingga pemilu cenderung dipahami sebagai ajang perwakilan kelompok, bukan pertarungan ide atau gagasan. Pada Pemilu Presiden 2019, kecenderungan ini semakin menguat. Pasangan calon tidak hanya dipandang sebagai representasi kebijakan atau visi politik, tetapi juga sebagai simbol identitas sosial tertentu. Said (2023) menunjukkan bahwa kampanye saat itu memanfaatkan bahasa simbolik yang menyentuh isu agama dan nasionalisme, yang menciptakan pemisahan yang tajam antara kelompok "kami" dan "mereka". Media sosial memainkan peran besar dalam mempercepat penyebaran narasi ini. Judijanto *et al.* (2023) mencatat bahwa media digital memperkuat kampanye berbasis identitas dengan menargetkan kelompok homogen, memperbesar bias, dan mempersempit ruang dialog publik yang sehat. Fikriana dan Arjuna (2023) menemukan bahwa dalam berbagai Pilkada, kandidat yang berasal dari kelompok etnis atau agama mayoritas cenderung memperoleh dukungan elektoral yang lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik identitas telah menjadi alat yang efektif untuk membentuk hubungan emosional antara kandidat dan pemilih. Meskipun strategi ini memberikan keuntungan elektoral, dampaknya tidak selalu positif. Ketegangan sosial yang muncul pasca-pemilu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis identitas dapat memperburuk sekat-sekat sosial dalam masyarakat.

Agustino *et al.* (2023) menjelaskan bahwa banyak partai politik menggunakan narasi simbolik yang merujuk pada agama, etnis, atau budaya dalam merancang strategi kampanye mereka. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan orientasi ideologis, tetapi juga merupakan manuver pragmatis untuk meraih suara. Pemilu 2024 dapat menjadi contoh yang relevan, di mana beberapa partai sengaja menyesuaikan pesan kampanye dengan identitas dominan di wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya digunakan untuk representasi kelompok, tetapi telah dipolitisasi untuk kepentingan elektoral jangka pendek. Konstruksi politik identitas di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui institusi formal seperti partai politik, tetapi juga diperkuat oleh aktor non-negara, terutama tokoh agama dan masyarakat adat. Pabayo (2023) mencatat bahwa tokoh agama memainkan peran penting dalam memengaruhi pilihan politik umat melalui ceramah, pengajian, dan forum keagamaan lainnya. Pesan-pesan politik sering disisipkan secara halus dalam konteks keagamaan, sehingga menciptakan kesan bahwa memilih kandidat tertentu adalah bagian dari kewajiban moral dan spiritual. Dalam masyarakat yang religius, otoritas tokoh agama sangat dipercaya, menjadikan strategi ini efektif dalam membentuk preferensi pemilih serta memperluas basis dukungan politik. Selain itu, simbol budaya lokal juga dimanfaatkan dalam strategi kampanye politik, sebagaimana dicatat oleh Prayer (2025). Banyak kandidat yang menggunakan pakaian adat, bahasa daerah, dan referensi budaya lokal dalam penampilan publik mereka untuk menunjukkan kedekatan emosional dengan pemilih. Praktik ini menciptakan rasa keterikatan dan kepercayaan karena kandidat dipandang sebagai bagian dari komunitas. Strategi ini menekankan afeksi daripada rasionalitas, sehingga pemilih cenderung memilih berdasarkan kesamaan identitas budaya, bukan pada program kerja atau visi-misi yang ditawarkan. Politik identitas dalam bentuk ini memanfaatkan warisan budaya sebagai instrumen pencitraan dan konsolidasi kekuatan elektoral. Judijanto *et al.* (2023) juga menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi alat utama dalam memobilisasi politik identitas secara luas dan terarah. Melalui algoritma digital, kampanye politik dapat menasar kelompok identitas tertentu dengan pesan-pesan yang disesuaikan dengan nilai dan keyakinan mereka. Pola ini mempercepat penyebaran narasi yang memperkuat bias kelompok dan memperuncing polarisasi sosial. Dalam banyak kasus, konten berbasis isu SARA digunakan untuk membangun citra eksklusif kandidat tertentu sekaligus mendiskreditkan lawan politik. Dengan demikian, media sosial bukan hanya sebagai ruang komunikasi, melainkan juga telah menjadi arena pembentukan identitas politik yang emosional dan semakin tertutup terhadap dialog antar kelompok. Wingarta *et al.* (2022) menjelaskan bahwa politik identitas yang dimobilisasi secara emosional berpotensi mengarah pada terbentuknya loyalitas politik yang bersifat primordial. Pemilih yang merasa memiliki kesamaan identitas dengan kandidat

cenderung menunjukkan dukungan yang tinggi, meskipun kandidat tersebut mungkin tidak memiliki program kerja yang jelas atau rekam jejak yang memadai. Loyalitas semacam ini menjadikan identitas sebagai faktor dominan dalam menentukan pilihan politik, sehingga menggeser ruang rasional dalam demokrasi. Hal ini menyebabkan proses politik menjadi dangkal dan berisiko memperlebar jurang sosial antarkelompok dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Tabel 1. Politik Identitas dalam Demokrasi Elektoral Indonesia

Aspek	Deskripsi	Referensi
Momentum Politik	Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 menunjukkan puncak politik identitas melalui narasi agama dan etnis untuk menggalang dukungan.	Lestari (2019); Wingarta <i>et al.</i> (2022); Said (2023)
Media Sosial	Media sosial digunakan secara masif dengan algoritma yang menyasar kelompok identitas tertentu melalui pesan yang diperkuat isu SARA.	Judijanto <i>et al.</i> (2023)
Peran Partai Politik	Partai politik merancang strategi kampanye berdasarkan identitas dominan di wilayah tertentu untuk meraih simpati dan suara elektoral.	Agustino <i>et al.</i> (2023)
Tokoh Agama & Masyarakat Adat	Tokoh agama dan masyarakat adat memengaruhi pilihan politik melalui ruang-ruang keagamaan dan budaya dengan pesan identitas terselubung.	Pabayo (2023)
Simbol Lokal	Kandidat menggunakan pakaian adat, bahasa daerah, dan simbol budaya untuk menunjukkan kedekatan emosional dengan pemilih.	Prayer (2025)
Loyalitas Politik	Kesamaan identitas menciptakan loyalitas emosional yang kuat, seringkali mengalahkan rasionalitas program atau visi kandidat.	Wingarta <i>et al.</i> (2022)

Peneliti mencatat bahwa fenomena politik identitas di Indonesia tidak lagi bersifat laten, melainkan telah berkembang menjadi strategi politik yang terorganisasi dan dimanfaatkan secara sadar oleh berbagai aktor politik. Identitas kini tidak hanya digunakan untuk membangun keterikatan emosional, tetapi juga sebagai alat untuk memetakan segmen pemilih yang potensial. Hal ini mencerminkan pergeseran orientasi politik dari rasionalitas kebijakan menuju pendekatan simbolik yang bersifat afektif. Isu-isu kebijakan sering kali terpinggirkan, karena pemilih cenderung lebih tertarik pada narasi identitas yang berhubungan erat dengan realitas sosial dan budaya mereka. Politik identitas yang dibangun melalui simbol, narasi, dan media digital telah berhasil membentuk loyalitas politik yang kuat, namun juga berisiko menimbulkan eksklusi dan polarisasi. Loyalitas yang terbentuk atas dasar kesamaan identitas sering kali mendorong sikap fanatik yang mengabaikan kualitas kepemimpinan. Dampaknya, kualitas demokrasi deliberatif tergerus karena diskursus politik tidak lagi dibangun atas dasar gagasan rasional, tetapi lebih pada sentimen emosional. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran politik yang inklusif dan mendorong partisipasi pemilih berdasarkan rasionalitas, agar demokrasi Indonesia tetap sehat dan mencerminkan semangat kebhinekaan yang sesungguhnya.

3.1.2 Implikasi Politik Identitas terhadap Kohesi Sosial dan Kualitas Demokrasi

Eksplorasi identitas dalam politik, baik yang berbasis agama, etnis, maupun status sosial, telah mendorong peningkatan eksklusi dan intoleransi dalam masyarakat Indonesia. Ketika identitas dijadikan alat kampanye, ruang partisipasi politik yang inklusif menjadi semakin sempit. Kelompok-kelompok minoritas sering kali distigmatisasi sebagai "yang berbeda," yang kemudian dijauhkan dari akses terhadap kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Suhariyanto (2024) menegaskan bahwa dinamika semacam ini menciptakan ketimpangan representasi dan memperburuk jurang sosial antar kelompok. Sebagai akibatnya, demokrasi kehilangan salah satu prinsip fundamentalnya, yakni

keterwakilan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang identitas mereka. Politik identitas yang disertai dengan retorika eksklusif justru merusak konsensus sosial yang vital bagi kohesi masyarakat. Alih-alih menyatukan, politik semacam ini malah mempertegas pemisahan antara kelompok "kami" dan "mereka." Danugroho (2024) mencatat bahwa ketika perbedaan identitas dijadikan alat perebutan suara, rasa saling percaya antar kelompok cenderung melemah. Demokrasi, yang seharusnya menjadi ruang untuk dialog dan kompromi, berubah menjadi arena konflik simbolik. Ketegangan seperti ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik horizontal yang sulit diselesaikan setelah pemilu berakhir. Politik identitas membawa dampak serius terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Ketika pemilih lebih mempertimbangkan kesamaan identitas dengan kandidat ketimbang kualitas program atau kemampuan kepemimpinan, legitimasi lembaga-lembaga demokrasi menjadi lemah. Fenomena ini mengalihkan perhatian publik dari substansi politik dan lebih menekankan pada preferensi identitas. Danugroho (2024) menjelaskan bahwa kondisi ini membuat pemilu kehilangan makna sebagai ajang perdebatan ide dan gagasan. Sebagai akibatnya, banyak kelompok merasa sistem politik tidak lagi merepresentasikan seluruh golongan secara setara. Ketidakpuasan ini berkembang menjadi sikap skeptis terhadap lembaga-lembaga formal seperti partai politik dan parlemen, yang dianggap bias dan tidak adil dalam menjalankan fungsi representatif mereka. Kondisi ini semakin diperburuk dengan peran media sosial yang cenderung memperkuat bias identitas. Melalui algoritma yang menyaring informasi sesuai preferensi pengguna, media sosial menciptakan ruang gema (echo chamber) yang menguatkan narasi identitas tertentu. Sarto (2019) mencatat bahwa hal ini tidak hanya mempersempit cakrawala berpikir masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi bahwa negara dan lembaga formal hanya berpihak pada kelompok dominan. Sebagai akibatnya, negara tidak lagi dipandang sebagai entitas netral yang mewakili seluruh rakyat, tetapi sebagai alat dari satu kelompok yang menguasai kelompok lainnya, yang merusak integritas dan kredibilitas sistem demokrasi secara keseluruhan.

Keterasingan politik menjadi salah satu dampak serius dari eksploitasi identitas dalam sistem demokrasi. Ketika institusi politik gagal memberikan ruang representasi yang adil bagi seluruh kelompok, terutama bagi mereka yang tergolong minoritas, muncul perasaan tidak diakui dalam proses pengambilan keputusan. Suhariyanto (2024) menyebutkan bahwa ketidaksetaraan ini menumbuhkan apatisisme dan mendorong sebagian warga menuju sikap radikal. Mereka merasa tidak memiliki tempat dalam sistem yang ada, sehingga cenderung menarik diri dari partisipasi politik atau mencari saluran alternatif yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Fenomena ini mengancam kelangsungan demokrasi, karena memperlemah fondasi partisipasi warga negara yang setara dan inklusif. Ketidakpercayaan yang berlarut terhadap sistem demokrasi turut memengaruhi legitimasi pemerintahan dalam jangka panjang. Ketika masyarakat terpecah berdasarkan identitas yang kaku, dukungan terhadap kebijakan publik menjadi terfragmentasi dan tidak solid. Danugroho (2024) menjelaskan bahwa dalam situasi yang sangat terpolarisasi, proses pembuatan kebijakan akan menghadapi banyak hambatan karena kesulitan dalam membangun konsensus lintas kelompok. Hal ini menyebabkan lembaga-lembaga negara kehilangan kemampuan untuk menjalankan mandat secara efektif dan adil. Jika kondisi ini dibiarkan, ia berpotensi mengarah pada stagnasi kebijakan yang dapat memperburuk ketegangan politik dan sosial di tingkat nasional. Meskipun politik identitas seringkali dikaitkan dengan polarisasi, ia juga memiliki potensi konstruktif jika dikelola dalam kerangka budaya lokal yang inklusif. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, identitas lokal dapat dijadikan sumber kekuatan untuk memperkuat solidaritas. Boyer *et al.* (2020) menekankan bahwa ketika identitas diposisikan secara positif, ia mampu mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan memperkuat rasa kebersamaan. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah dapat menjadi dasar untuk memperkuat demokrasi berbasis kebudayaan. Politik identitas yang mengakar pada nilai-nilai komunitas lokal akan menciptakan narasi kebangsaan yang lebih inklusif dan harmonis. Aspek komunikasi Islam memainkan peran penting dalam membentuk politik identitas yang sehat, adil, dan inklusif. Nilai-nilai seperti toleransi, musyawarah, dan persaudaraan menjadi fondasi etis dan spiritual untuk menciptakan ruang dialog yang damai dan saling menghormati antar

kelompok identitas yang berbeda. Hal ini relevan dalam konteks politik identitas yang seringkali menciptakan eksklusivitas, sejalan dengan Busyro *et al.* (2019) yang menekankan bahwa moderasi dalam Islam sangat penting untuk menyeimbangkan keberagaman pandangan di tengah pluralisme. Hulu *et al.* (2024) menambahkan bahwa penguatan nilai-nilai toleransi dapat secara efektif menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik dalam masyarakat multikultural. Siagian dan Silitonga (2023) mencatat bahwa pendekatan ini efektif dalam mendorong rekonsiliasi sosial dan menjaga kesatuan bangsa. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip komunikasi Islam ini, politik identitas dapat diarahkan untuk memperkuat solidaritas nasional dan keadilan sosial dalam sistem demokrasi yang inklusif. Boyer *et al.* (2020) berpendapat bahwa dengan membangun kesadaran politik berbasis nilai-nilai etis dan spiritual, identitas tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan jembatan untuk kolaborasi. Jika dikombinasikan dengan budaya lokal yang menghargai keberagaman, politik identitas justru dapat memperkuat demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial dan menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan. Peneliti mencatat bahwa potensi konstruktif dari politik identitas masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam praktik demokrasi Indonesia. Politik identitas sering kali hanya dijadikan sebagai instrumen elektoral, tanpa memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam budaya lokal dan ajaran agama. Padahal, jika dikelola dengan bijak, politik identitas dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan komunitas dan memperkuat inklusi politik di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam kerangka ini, penguatan pendidikan politik berbasis multikulturalisme, disertai dengan internalisasi nilai-nilai etika komunikasi Islam, menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif yang menghargai perbedaan, bukan menjadikannya alat untuk pemecah belah. Diperlukan kebijakan publik yang mendorong integrasi sosial melalui program-program lintas identitas. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan ruang dialog antar kelompok dengan pendekatan partisipatif. Dengan demikian, politik identitas dapat diarahkan untuk menjadi wahana pembangunan solidaritas sosial dan demokrasi yang adil. Upaya ini sangat penting untuk mencegah reproduksi polarisasi dalam setiap siklus politik dan memastikan bahwa demokrasi Indonesia tumbuh di atas fondasi yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman, sebagaimana digariskan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

3.2 Pembahasan

Fenomena politik identitas di Indonesia semakin berkembang dan berperan penting dalam dinamika demokrasi elektoral. Seperti yang diungkapkan oleh Agustino, Mona, dan Silas (2023), politik identitas bukan lagi sekadar respons terhadap ketimpangan sosial, melainkan telah menjadi strategi terorganisir yang dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memenangkan dukungan pemilih. Dalam hal ini, politik identitas digunakan sebagai alat untuk membangun loyalitas politik, terutama melalui simbol-simbol agama, etnis, dan budaya yang dapat menghubungkan kandidat dengan segmen-segmen pemilih tertentu. Isu agama dan etnis, misalnya, sering digunakan untuk menarik dukungan dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional, seperti yang terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu Presiden 2019. Politisi yang menggunakan politik identitas sering kali memperoleh keuntungan elektoral, namun dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya polarisasi dan ketegangan sosial (Lestari, 2019; Said, 2023). Peran media sosial dalam menyebarkan narasi identitas juga semakin signifikan. Dengan algoritma yang menyesuaikan informasi sesuai preferensi pengguna, media sosial mempercepat penyebaran narasi identitas tertentu dan memperkuat bias kelompok (Judijanto *et al.*, 2023). Fenomena ini mempersempit ruang dialog publik yang sehat dan memperburuk polarisasi di masyarakat, karena ruang untuk perbedaan pendapat semakin sempit. Seperti yang dicatat oleh Sarto (2019), ruang gema yang tercipta di media sosial hanya menguatkan pandangan kelompok tertentu, sementara perbedaan pendapat cenderung terabaikan. Hal ini menyebabkan proses politik menjadi lebih emosional, di mana afeksi dan kesamaan identitas menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan politik, menggantikan rasionalitas yang seharusnya menjadi dasar dalam memilih pemimpin.

Meskipun politik identitas berisiko menyebabkan polarisasi sosial, ia juga memiliki potensi positif apabila dikelola dengan bijaksana. Boyer *et al.* (2020) menunjukkan bahwa politik identitas yang dikelola secara positif dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Konsep ini sejalan dengan pendapat Busyro *et al.* (2019), yang menekankan pentingnya moderasi dalam Islam untuk menyeimbangkan pandangan dalam masyarakat yang plural. Dengan mengedepankan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah, politik identitas dapat menjadi alat yang mengarah pada pembentukan demokrasi yang lebih harmonis dan inklusif di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa agar politik identitas tidak memperburuk perpecahan sosial, diperlukan kebijakan publik yang mendorong integrasi sosial antar kelompok. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Pendidikan multikultural dan penguatan nilai-nilai etika komunikasi Islam dapat membantu membangun kesadaran politik yang menghargai keberagaman, bukan justru menjadikannya alat pemecah belah. Seperti yang disarankan oleh Danugroho (2024) dan Tettey (2022), upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa politik identitas tidak mengancam stabilitas sosial dan politik, serta agar demokrasi Indonesia berkembang di atas dasar kebhinekaan yang sesungguhnya.

4. Kesimpulan

Politik identitas di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang memiliki dua sisi: sebagai sarana pemberdayaan kelompok marginal dan sekaligus sebagai potensi sumber eksklusi serta polarisasi sosial. Politik identitas dimobilisasi secara strategis melalui narasi, simbol, tokoh agama, media sosial, dan institusi politik untuk membentuk loyalitas pemilih yang emosional. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi deliberatif serta meningkatnya ketegangan antar kelompok identitas. Namun demikian, jika dikelola secara bijak dalam kerangka budaya lokal dan nilai-nilai komunikasi Islam seperti toleransi, musyawarah, dan persaudaraan, politik identitas dapat diarahkan menjadi fondasi solidaritas dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif melalui kebijakan inklusif, pendidikan multikultural, serta penguatan kesadaran politik yang menghargai keberagaman untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkelanjutan, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan.

5. Daftar Pustaka

- Agustino, L., Sylviana, M., & Silas, J. (2023). INSTITUSIONALISASI DAN KETAHANAN PARTAI DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA:: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 105-130. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.129>.
- Bennett, S., Moon, D. S., Pearce, N., & Whiting, S. (2021). Labouring under a delusion? Scotland's national questions and the crisis of the Scottish Labour Party. *Territory, Politics, Governance*, 9(5), 656-674. <https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1743204>.
- Boyer, M., Aaldering, L., & Lecheler, S. (2020). Motivated reasoning in identity politics: group status as a moderator of political motivations. *Political Studies*, 70(2), 385-401. <https://doi.org/10.1177/0032321720964667>.
- Busyro, B., Ananda, A., & Adlan, T. (2019). Moderasi Islam (wasathiyah) di tengah pluralisme agama Indonesia. *Jurnal Fuaduna*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i1.1152>.

- Calhoun, C. (1994). Social theory and the politics of identity.
- Castells, M. (2011). *The power of identity* (Vol. 14). John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Danugroho, A. (2024). Defects of democracy: the continuity of identity politics in post-reform regional elections. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 89–101. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.89-101>.
- Deveaux, M. (1999). Agonism and pluralism. *Philosophy & Social Criticism*, 25(4), 1–22. <https://doi.org/10.1177/019145379902500401>.
- Fikriana, A., & Arjuna, M. (2023). Tantangan dan upaya penanganan politik identitas pada pemilu 2024. *Dalihan Na Tolu*, 2(02), 18-23. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.275>.
- Garneau, C., & Schwadel, P. (2022). Examining the influence of political affiliation and orientation on political tolerance. *Socius*, 8. <https://doi.org/10.1177/23780231221132368>.
- Hulu, V., Waruwu, J., Gulo, R., & Tafonao, T. (2024). Pluralisme agama di Indonesia: memperkuat toleransi dalam masyarakat majemuk. *PJSALB*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.62282/pj.v2i1.1-12>.
- Judijanto, L., Maulinda, R., Zulaika, S., Tjahyadi, I., & Suroso, S. (2023). Pengaruh sumber informasi dan interaksi sosial di media sosial terhadap pembentukan opini politik masyarakat di Indonesia. *SISH*, 1(01), 21-31. <https://doi.org/10.58812/sish.v1i01.303>.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika politik identitas di Indonesia. *Jupe Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12. <https://doi.org/10.36312/jupe.v4i4.677>.
- Levitt, L. (2022). Divergent fan forums and political consciousness raising. *Media and Communication*, 10(1), 329–338. <https://doi.org/10.17645/mac.v10i1.4707>.
- Margolis, M. (2016). Cognitive dissonance, elections, and religion. *Public Opinion Quarterly*, 80(3), 717–740. <https://doi.org/10.1093/poq/nfw023>.
- Mujani, S. (2020). Intolerant democrat syndrome: The problem of Indonesian democratic consolidation. *Jurnal Politik*, 6(1), 5. <https://doi.org/10.7454/jp.v6i1.336>.
- Pabayo, R. (2023). Dialog agama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. *Daya Nasional*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64947>.
- Prayer, A. (2025). Politik identitas dalam pemilu: Studi kasus pemilihan umum di daerah multikultural. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 89-94. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.182>.
- Said, R. (2023). Fenomena politik identitas dalam pemilu di Indonesia. *Citizen Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 44-51. <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233>.
- Sarto, R. (2019). Insecurity, identity politics, and the restructuring of the Middle East. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3367808>.

Siagian, Z., & Silitonga, E. (2023). Dalihan na tolu (DNT) sebagai rekonsiliasi konflik agama Islam-Kristen dalam masyarakat Batak. *Mitra Srivijaya*, 4(1), 18–31. <https://doi.org/10.46974/ms.v4i1.71>.

Suhariyanto, D. (2024). Identity politics violations in Indonesian elections. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 5(5), 558–563. <https://doi.org/10.59188/devotion.v5i5.720>.

Syarif, M. (2019). Local political parties in Aceh in 2017 regional election: Analysis of political identity and Islamization issue. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 20(2), 346–363. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5668>.

Tettey, W. (2022). Politics of belonging and democratic contestation in plural societies. *Journal of African Political Science*, 1(1), 45–61. <https://doi.org/10.1057/s41284-022-00295-1>.

Wingarta, I., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I., & Wicaksono, R. (2022). Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembannas RI*, 9(4), 117-124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.256>.

Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage publications.